

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia menjadi manusia karena pendidikan. Beberapa penemuan membuktikan bahwa manusia yang dibesarkan oleh bukan manusia cenderung memiliki perilaku mirip makhluk yang membesarkannya.

Manusia yang dibesarkan oleh serigala berkecenderungan berperilaku dan berkemampuan seperti serigala. Manusia yang dibesarkan oleh rusa berkecenderungan berperilaku dan berkemampuan seperti rusa. Demikian seterusnya.

Ada pula penemuan seorang gadis kecil berumur enam setengah tahun yang hidup seorang diri semenjak dilahirkan karena disembunyikan. Pada awalnya, semenjak diketemukan, sang bocah kerjanya hanya bisa menangis dan menangis.

Penemuan gadis cilik tersebut membuktikan bahwa manusia itu sejak dilahirkan merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Dua, bahwa manusia itu mengkonsumsi pendidikan seumur hidupnya, mulai dari buaian sampai ke liang lahat.

Kebutuhan akan pendidikan merupakan suatu tuntutan dinamika hidup dalam upaya manusia untuk bisa mampu menyesuaikan diri secara aktif, dinamis, kreatif, dan inovatif terhadap diri dan kemajuan zaman.

Dunia yang menjadi tempat hidup manusia merupakan buku pelajaran yang paling besar dan paling lengkap dan tidak akan bisa habis dikaji untuk dipahami dan diambil manfaatnya sepanjang hayat. Pribahasa Minangkabau telah menyitir fenomena ini ke dalam istilah *alam takambang jadi guru*.

Pendidikan seumur hidup secara tidak langsung lebih mengedepankan tujuan daripada pendidikan non-formal sekaligus membedakannya dengan konsep pendidikan formal yang diberikan melalui kegiatan persekolahan atau akademis.

Secara keilmuan, konsep pendidikan seumur hidup merupakan rekomendasi Faure<sup>1</sup> di tahun 1972 demi terciptanya masyarakat gemar belajar (*learning society*) sekaligus sebagai dasar pembaruan pendidikan sepanjang masa seiring perkembangan zaman yang berubah secara dinamis.

Indonesia sendiri baru secara resmi melegalkan konsep pendidikan seumur hidup sebagai salah satu prinsip pembangunan nasional dalam Ketetapan MPR No.IV/MPR/1973 jo Ketetapan MPR No.IV/MPR/1978 tentang GBHN.

Dalam Bab IV, Bagian Pendidikan, butir (d), disebutkan bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam rumah tangga atau keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Sesuai sifatnya yang seumur hidup, pendidikan menjelma menjadi bekal dalam hidup dan kehidupan seseorang, yang mana bekal tersebut -diukur dalam nilai, arti, fungsionalitas, atau lainnya- melebihi segala sesuatu yang dihasilkan dari semua sistem pendidikan yang ada, baik itu formal maupun tidak atau yang sudah melembaga maupun belum.

Pendapat Paulo Freire: *Education is attributed a key role in both preventing conflict and rebuilding post-conflict societies. The dialectical approach to education, which was ceaselessly emphasized by the Brazilian educator Paulo Freire, signifies within a scenario of conflict or post-conflict that every education system has the potential to either aggravate the conditions that lead to violent conflict or to overcome and heal them. However, independent from the potential role of education to reverse or contribute to development, education systems are invariably debilitated by conflict.*<sup>2</sup>

(Terjemahan tidak resmi: Pendidikan merupakan atribut dari sebuah peran kunci dalam mencegah konflik dan membangun kembali masyarakat setelah pasca konflik. Dialog pendidikan yang ditekankan oleh Pendidik dari Brazil-Paulo Freire, menyatakan kedalam sebuah skenario konflik atau pasca konflik bahwa setiap sistem pendidikan

---

<sup>1</sup> Faure, Edgar, *Learning To Be: The World of Education, Today and Tomorrow*, UNESCO, 1972; dalam Tirtarahardja, Umar, S.L. La Sulo, *Pengantar Pendidikan*, Ed.rev., Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal.42-44.

<sup>2</sup> Pendapat Paulo Freire dalam Hanemann, Ulrike, *Literacy in Conflict Situations*, UNESCO Institute for Education, Hamburg, March 2005, hal.2.

berpotensi memperburuk kondisi sehingga menodai konflik tersebut atau memperbaikinya. Namun, lepas dari peran potensi dari pendidikan untuk mengembalikan atau menyumbang pada sistem pendidikan yang biasanya hancur karena konflik.)

Sebagai pengalaman yang mengubah kehidupan dan dalam hubungannya dengan situasi konflik, setiap sistem pendidikan dimanapun jua berpotensi memperbesar kondisi yang mengarah pada konflik kekerasan atau mengatasi dan meredakan konflik. Atau dengan kata lain, pendidikan bisa menjadi katalis konflik atau peluang untuk memperbaiki kondisi pendidikan ke arah yang lebih baik.

Lebih jauh Hanemann berpendapat, biasanya, badan-badan PBB memanfaatkan situasi masa darurat dan rekonstruksi awal sebagai upaya mentransformasi sistem pendidikan, yang mana lebih merupakan pendekatan pembangunan ketimbang bantuan kemanusiaan.<sup>3</sup>

Berikut kutipan Hanemann, *“Trying to follow the appeal of influential UN agencies to use emergencies and early reconstruction for transformation of education systems, with rather a developmental approach than one of humanitarian assistance,<sup>4</sup> educational planners and strategists, in practice however, often concentrate their resources and energies on the mainstream formal schooling system while literacy and youth and adult basic education are frequently small in scale, marginalized or completely consigned to NGOs and civil society institutions.”*

(Terjemahan tidak resmi: Mereka mencoba mengikuti seruan badan-badan PBB yang berpengaruh untuk memanfaatkan situasi masa darurat dan rekonstruksi awal sebagai upaya transformasi sistem pendidikan. Upaya ini nampaknya lebih merupakan pendekatan pembangunan ketimbang bantuan kemanusiaan. Perencana pendidikan dan pembuat kebijakan strategis pada prakteknya sering memfokuskan sumber daya dan energi pada sistem persekolahan formal tetapi ‘memarjinalkan’ atau ‘mendelegasikan’ pendidikan melek huruf dan pendidikan

---

<sup>3</sup> Ibid, hal.10.

<sup>4</sup> Hanemann merujuk pada makalah UNICEF yang sangat berpengaruh yang dibuat Pigozzi, Mary Joy, “Education in Emergencies and for Reconstruction: A Developmental Approach,” *Paper*, UNICEF, 1999. Pigozzi saat ini menjabat sebagai Senior VP di Academy for Educational Development (AED) dan mantan UNESCO Global Coordinator for HIV and AIDS.

dasar bagi anak-anak dan orang dewasa kepada LSM dan lembaga kemasyarakatan sipil.)

Pendidikan mewujudkan dirinya sebagai pedang dengan dua sisi, arah mata pedang mana yang ingin diasah tergantung politik pendidikan yang diterapkan oleh para penguasa. Pendidikan menjadi alat penguasa untuk ikut mendukung rezim yang sedang berkuasa.<sup>5</sup>

Indeks Pembangunan Manusia (HDI) yang rutin dipublikasikan UNDP memperlihatkan kuatnya korelasi antara upaya pembangunan manusia dengan kecenderungan berkonflik. Semakin rendah HDI suatu negara, semakin tinggi kecenderungan terjadinya konflik.

Di sisi lain, pendidikan masih sering dipahami sebagai suatu kegiatan mulia yang selalu mengandung kebajikan dan senantiasa berwatak netral, walau sebenarnya mengandung umpan yang bernama penindasan.<sup>6</sup> Walau demikian, pendidikan tetap dipandang memegang peranan kunci dalam mencegah konflik dan membangun ulang masyarakat pasca-konflik serta perdamaian dan stabilitas yang abadi.

Bila pendidikan memiliki dua sisi yang saling berlawanan terhadap konflik, sebaliknya konflik hanya memiliki satu sisi terhadap pendidikan, yakni membawa kehancuran pada sektor pendidikan. Sebagai bencana buatan manusia, konflik menimbulkan penderitaan dan dampak psikologis terhadap siswa dan guru serta degradasi kondisi materi dan prasarana pendidikan.

Bencana perang telah memaksa kelompok masyarakat yang tidak terlibat untuk mengungsi meninggalkan tempat tinggal mereka. Keterpaksaan bisa karena memang diperintahkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik atau karena merasa takut mengalami kekerasan hingga kematian.

Selama konflik, hambatan utama penyelenggaraan pendidikan berbentuk waktu dan tempat. Beberapa faktor yang membedakan manusia berpotensi menjadi penghambat lainnya seperti umur, jenis kelamin, agama, tradisi dan

---

<sup>5</sup> Sindhunata, *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*, Kanisius, Yogyakarta, 2000, hal.86; dalam Muslim, Muh., "Kebijakan Desentralisasi dalam Otonomi Pemerintahan," hal.137-157.

<sup>6</sup> Pendapat Paulo Freire dan Ivan Illich dalam Arifin, "Pendidikan sebagai Pendorong dan Penunjuk Arah Perubahan Sosial," dalam Amnur, Ali Muhdi (ed), *Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional*, Pustaka Fahima, Yogyakarta, 2007, hal.99-114.

norma-norma budaya, etnis, bahasa, kecukupan gizi, kesehatan, cacat, atau berbagai kerentanan lainnya.

*Each conflict is unique in its constellation of causes and processes. However, they all generate terrible consequences for the men, women and children caught up in them. It is estimated that almost 80% of the world's refugees, returnees and internally displaced are women and children (Johal, R., 2004:3).<sup>7</sup>*

(Terjemahan tidak resmi: Setiap konflik adalah sesuatu yang unik dalam konstalasi dari penyebab dan proses. Namun, konflik tersebut muncul yang mengakibatkan adanya konsekuensi dampak terhadap orang seperti laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Diperkirakan hampir 80% pengungsi lintas batas, pengungsi yang kembali, dan IDP's, diantaranya adalah perempuan dan anak-anak.)

Di tingkat dunia, sekitar 80% pengungsi akibat bencana buatan manusia atau bencana alam, berasal dari kelompok wanita dan anak-anak. Minimal setengahnya merupakan anak-anak. Wanita dan anak-anak merupakan sasaran perang dan korban perkosaan, penyiksaan, dan kekejaman.

## 1.2. Identifikasi Permasalahan

Aceh yang tidak pernah lepas dari konflik puluhan tahun telah membuat segala aspek kehidupan manusia menjadi lumpuh. Bencana buatan manusia tersebut memakan korban jiwa, kejiwaan, serta berbagai sarana dan prasarana kehidupan, termasuk sektor ekonomi dan pendidikan.

Perang yang meniadakan mobilitas penduduk berdampak pada hilangnya kemampuan ekonomi masyarakat Aceh, bahkan untuk sekedar keperluan menyambung hidup. Tingkat kemiskinan yang tinggi menjadi salah satu indikator kehancuran Aceh.

Kemiskinan merupakan faktor utama yang menyebabkan orang dari atau di daerah bencana harus menjaga kelangsungan hidupnya dan pada saat yang bersamaan mencegah mereka memanfaatkan kesempatan untuk mengikuti proses pendidikan.

---

<sup>7</sup> Johal, Ramina, *Key Issues for Refugee, Internally Displaced and Returnee Populations*, United Nations Division for the Advancement of Women (DAW), CM/MMW/2003/EP.3, 14 January 2004, hal.3.

Masyarakat Aceh yang telah miskin akibat bencana perang menjadi lebih miskin lagi ketika bencana tsunami datang menyapu bersih hampir seluruh pesisir pantai Aceh. Bencana alam tersebut menimbulkan kehancuran luar biasa secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Masyarakat Aceh semakin menjadi rentan terhadap bencana kemiskinan, kelaparan, dan epidemi.

Beberapa kalangan berpendapat, bencana alam di akhir tahun 2004 merupakan berkah tersembunyi bagi masyarakat Aceh. Malapetaka tsunami membuka isolasi yang dilakukan terhadap Aceh selama 131 tahun, yakni sejak Perang Aceh, berupa terbukanya kembali hubungan langsung antara Aceh dengan daerah lain dan dengan negara asing.

### **1.3. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana konflik, yang terjadi selama puluhan tahun di Aceh, bisa mempengaruhi pemenuhan hak atas pendidikan di Aceh?
2. Bagaimana dampak bencana buatan manusia dan bencana alam terhadap sektor pendidikan di Aceh berikut upaya penanggulangannya?
3. Bagaimana peran pihak-pihak yang merasa bertanggungjawab pada upaya pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak-anak dalam pengungsian?

### **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman atas terjadinya konflik yang menyebabkan bencana perang puluhan tahun.
  - b. Untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman atas dampak bencana buatan manusia dan bencana alam terhadap anak dan sektor pendidikan di Aceh berikut upaya penanggulangannya.
  - c. Untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman atas peran pihak-pihak yang merasa bertanggungjawab pada upaya pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak-anak dalam pengungsian.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Untuk menambah sumbangan pemikiran dan khazanah tulisan tentang pemahaman atas upaya pemenuhan hak asasi manusia anak dalam bidang

pendidikan. Pemahaman demikian perlu diteliti guna mendapatkan gambaran secara akademik.

## 1.5. Landasan Teori dan Kerangka Konseptual

### 1. Landasan Teori

Anak sebagai manusia yang belum dewasa juga memiliki hak-hak selayaknya sebagai manusia dewasa pula. Kebelaaan anak secara umur dan pengalaman, dan secara fisik maupun psikis, membuatnya rentan untuk selalu ditempatkan pada posisi lemah dan sering dijadikan sebagai objek, atau membuatnya rawan untuk terkena masalah sosial dan mengalami masalah sosial.

Oleh karena itu, keberadaan anak yang rentan membuat semua negara yang peduli terhadap segala aspek tentang anak menetapkan komitmen secara bersama, baik dalam bentuk deklarasi, kovenan, konvensi, protokol, atau lainnya, baik yang bersifat mengikat maupun tidak.

Anak dalam perkembangannya memiliki permasalahannya tersendiri. Permasalahan anak menjadi lebih kompleks ketika anak dihadapkan pada bencana yang menimpa dirinya, baik itu bencana buatan manusia maupun bencana alam.

Selain berpotensi menderita secara fisik, dampak bencana yang lebih besar adalah pada aspek kejiwaan. Gangguan stres pasca-trauma (PTSD) yang bila tidak ditangani dengan secepatnya bisa menimbulkan efek yang permanen bagi anak-anak.

Dampak bencana bisa sangat besar pada anak atau remaja yang telah memiliki masalah kesehatan jiwa, pernah menyaksikan *extreme stressor*, kesaksian yang lebih besar terhadap bencana dan sesudahnya, dan mereka yang kurang memiliki dukungan keluarga dan teman sebaya.

Kondisi anak yang rentan pada masa bencana dan sesudahnya membuat mereka sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang lebih dari yang biasanya. Bukan tidak mungkin, kondisi yang rentan ini membuat anak dimanfaatkan menjadi korban pedofil, perbudakan, barang dagangan, atau pelacuran anak.

Walaupun demikian, dalam jangka pendek, kebanyakan anak dan para remaja bisa cepat sembuh dari kecemasan dan kegelisahan akibat bencana, khususnya bila ditangani secepatnya dan adanya orang dewasa yang menjaga, mengasuh, dan membimbingnya.

Berbagai riset dan pengalaman menunjukkan bahwa selain orangtua, keluarga, dan pengasuh lainnya, komunitas sekolah berperan penting dalam membantu anak melewati kejadian traumatis. Oleh karena itu, WHO sangat menyarankan diadakannya pemercepatan kegiatan persekolahan dan rekreasi setelah terjadi bencana tsunami.

Anak-anak cenderung merasa aman dan terlindungi saat mereka menjalani rutinitas kehidupan yang konsisten dan bisa dibayangkan seperti menjalankan rutinitas bersekolah. Sekolah bagi anak-anak merupakan tempat mereka mempelajari dunia. Sekolah juga dianggap sebagai pusat pengorganisasian hari-hari mereka dan membolehkan mereka berinteraksi dengan teman sebaya.

## 2. Kerangka Konseptual

Pentingnya konsep pemercepatan kegiatan persekolahan dan rekreasi bagi anak yang baru mengalami bencana bukan saja diaminkan oleh para pihak yang bertanggungjawab pada upaya pemenuhan hak bagi anak atas pendidikan, melainkan juga dilaksanakan dengan sepenuhnya, baik secara fisik, finansil, moral, dan dengan segenap perasaan dan pikiran.

Upaya pemercepatan tersebut berangkat dari pemikiran bahwa jiwa dan pikiran anak yang tergoncang akibat bencana perlu untuk segera ditenangkan. Kegiatan persekolahan dan rekreasi menjadi pilihan terapi yang tepat dengan mengembalikan anak ke dunianya, bersekolah dan bermain dengan teman sebayanya.

Secara psikologis, sang anak mampu berbagi kisah dan pengalaman kepada sesama temannya yang juga mengalami nasib yang sama. Selain memiliki kesempatan berbagi duka, mereka juga berbagi suka kala mereka bermain. Secara psikososial, interaksi dengan teman sebaya (*peer group*) merupakan dukungan moral yang tidak kalah pentingnya.

Mengacu pada konsep pendidikan yang berperan terhadap proses pertumbuhan fisik dan perkembangan mental, pemercepatan kegiatan pendidikan jelas mempercepat pemulihan peserta didik untuk memulihkan kembali kekuatannya, bakat, kemampuan, dan minatnya.

Situasi masa-masa darurat dan rekonstruksi awal sangat dimanfaatkan momentumnya oleh badan-badan PBB untuk menstel-ulang (*reset*) dan melakukan upaya mentransformasi sistem pendidikan, yang mana lebih merupakan pendekatan pembangunan ketimbang bantuan kemanusiaan. Komitmen tegas lembaga-lembaga tersebut adalah membangun ulang lebih baik sekaligus menciptakan standar yang lebih tinggi.

Pada masa pasca-bencana, pendidikan yang diberikan hendaknya memasukkan materi ajar terbaru, khususnya pendidikan tentang bencana dan segala aspek terkait, terutama pendidikan mitigasi bencana dan pengajaran penyesuaian (*adaptasi*) terhadap dinamika lingkungan yang terus berubah.

## 1.6. Hipotesis

Dasar-dasar hipotesis:

- a) Konflik terjadi karena adanya perbedaan kepentingan. Konflik politik harus diselesaikan secara politik.
- b) Konflik tidak akan bisa diselesaikan dengan baik bila yang bersengketa tidak memiliki persyaratan yang dibutuhkan dalam rangka meredam konflik, yakni kemauan politis yang kuat bahwa konflik tidak boleh mengarah pada kekerasan, bersenjata atau tidak, dan yang terutama konflik boleh terjadi dengan kesepakatan adanya perdamaian yang abadi.
- c) Konflik yang tidak diselesaikan dengan baik cenderung bermuara pada kekerasan, baik bersenjata ataupun tidak.
- d) Budaya konflik dan budaya kekerasan menjadi bisa semakin subur ataupun berganti menjadi budaya suka damai tergantung arah pendidikan yang ingin dicapai para 'penguasa'. Adagium yang berlaku adalah kebudayaan diwariskan melalui pendidikan.

Adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Konflik berpotensi menimbulkan efek negatif bagi kehidupan manusia, khususnya pada sektor pendidikan.
2. Pendidikan bisa mempertajam konflik atau meredam konflik.
3. Bencana, apapun sumbernya, sangat destruktif bagi hidup dan kehidupan manusia, khususnya pada sektor pendidikan.
4. Tanggap darurat yang paling utama pada masa pasca-bencana adalah ketersediaan alat, barang, bahan, obat, dan hal-hal yang paling pokok demi kelangsungan hidup secara fisik serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya terhadap anak-anak.
5. Rasa sosial dan kemanusiaan yang tinggi di kalangan filantropis dan semua pihak yang merasa bertanggungjawab pada upaya pemenuhan hak atas pendidikan bagi pengungsi anak membuat mereka berkewajiban menyumbangkan apa yang mereka bisa lakukan demi berlangsungnya pendidikan bagi pengungsi anak.

## 1.7. Metode Penelitian

### 1. Sifat Penelitian

Penelitian untuk tesis ini merupakan penelitian *socio-legal*. Penelitian *socio-legal* yang dilakukan bertujuan memperoleh gambaran atas konsep yang abstrak diwujudkan dalam prakteknya serta mendapatkan penjelasan bermakna tentang gejala hukum yang diinterpretasi secara faktual.<sup>8</sup> Penelitian ini juga mengidentifikasi konsep atau gagasan dan asas-asas hukum dengan menekankan pada kajian terhadap berbagai teori atau konsep dan praktek yang berkaitan hak-hak asasi manusia, khususnya hak anak mendapatkan pendidikan.<sup>9</sup>

### 2. Data dan Informasi

Data dan informasi dalam penelitian ini berupa dokumen berbentuk buku teks, file digital, jurnal, peraturan perundang-undangan, makalah, artikel, dan tulisan ilmiah lainnya.

---

<sup>8</sup> Latif, Abdul, *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, Mei 2007, hal.53-54. Lihat juga Bruggink, J.J.H., *Rechtsreflecties: Grondbegrippen uitde rechtstheorie*, Kluwer – Deventer, 1993; diterjemahkan oleh Sidarta, Arief, *Refleksi tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal.163.

<sup>9</sup> Ibid.

Data dan informasi yang diperoleh berasal dari perpustakaan, toko buku, internet, wawancara langsung dengan beberapa narasumber pokok yang bisa memberikan *conclusive perspectives* atas tema tesis ini.

### 3. Metode Analisa

Dalam melakukan analisa terhadap sumber data dan informasi, beberapa pendekatan dilakukan, bisa secara satu per satu atau secara bersamaan, tergantung konteks yang ingin dibahas. Pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan perundang-undangan (*statute*), pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan.

Demi mendapatkan pengalaman dan pemahaman yang lebih mendalam (*first-hand and on-sight experiences and understandingness*), penulis merasa perlu melakukan pengamatan dan verifikasi secara fisik dengan pengetahuan yang telah penulis kumpulkan dan analisis. Observasi dan verifikasi dilakukan penulis pada masa penelitian dan penulisan tesis.

## 1.8. Sistematika Penulisan

Penulis membagi penulisan tesis ini ke dalam enam bab, yakni:

- a. Bab I yang merupakan pendahuluan berisikan latar belakang masalah, identifikasi permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, landasan teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- b. Bab II yang merupakan tinjauan pustaka memuat uraian singkat tentang Konsep Anak.
- c. Bab III yang merupakan tinjauan singkat terhadap Konsep Pendidikan dan Perkembangan Pendidikan di Indonesia.
- d. Bab IV yang merupakan tinjauan singkat terhadap sejarah Aceh dan perkembangannya.
- e. Bab V yang merupakan analisa berisikan upaya pemenuhan hak atas pendidikan bagi pengungsi anak.
- f. Bab VI yang merupakan penutup berisikan Kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah disajikan berikut Saran dan/atau Rekomendasi.